

**PROGRAM PENANGANAN GELANDANGAN
DAN PENGEMIS DI KABUPATEN JEMBER
(HANDLING PROGRAMS OF HOMELESS AND BEGGAR)
IN JEMBER DISTRICT)**

Oleh:

Baktiawan Nusanto, Debby Cahya Nuriantika, Putri Robiatul Adawiyah *

*Program Studi Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jember

Email: baktiawan.nusanto@unmuhjember.ac.id

debbycahya44@gmail.com, putri.ra@unmuhjember.ac.id

Abstract

The results of the research show that during the last three (2013 - 2015) the number of homeless and beggars in Jember District tend to increase from year to year. In addition to the lack of social service in the implementation of homeless and begging programs, the increasing number of homeless and beggars is also caused by the increasing number of poverty in Jember regency. Until 2015 the number of homeless and beggars in Jember Regency reached 801 people. In the effort to handle the problem of homeless and beggars, the Jember District Social Service has implemented various programs including: (1) Social education in homeless place and beggars are located; (2) Family empowerment, basic needs fulfillment, health and education services, employment and family income; (3) Establish postal service posts and beggars to provide consultation, data collection, networking, referrals for homeless and beggars to be followed up by the rehabilitation process; (4) Conducting Raids in places where homeless and beggars are often located. The raids were conducted after social counseling was initiated to recruit homeless and beggars who were temporarily housed in a shelter barracks before being sent to social rehabilitation centers; (5) Optimizing UPTD functions Liposos and NGOs dealing with homeless and beggars; (6) Cooperation with the business world in order to employ the homeless and beggars.

Keywords: Handling Program, Homeless and Beggar

Abstrak

Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa selama tiga terakhir (2013 – 2015) jumlah gelandangan dan pengemis di Kabupaten Jember cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Selain disebabkan oleh belum maksimalnya Dinas Sosial dalam melaksanakan program penanganan gelandangan dan pengemis, peningkatan jumlah gelandangan dan pengemis ini juga disebabkan oleh semakin meningkatnya jumlah angka kemiskinan di Kabupaten Jember. Sampai dengan tahun 2015 jumlah gelandangan dan pengemis di Kabupaten Jember mencapai 801 orang. Dalam upaya menangani masalah gelandangan dan pengemis ini Dinas Sosial Kabupaten Jember telah melaksanakan berbagai program diantaranya: (1) Penyuluhan sosial di tempat gelandangan dan pengemis berada; (2) Penguatan keluarga, pemenuhan kebutuhan dasar, layanan kesehatan dan pendidikan, lapangan kerja dan pendapatan keluarga; (3) Mendirikan pos pelayanan gelandangan dan pengemis untuk memberikan konsultasi, pendataan, penjangkaran, rujukan bagi gelandangan dan pengemis untuk ditindak lanjuti proses rehabilitasi; (4) Melakukan Razia di tempat-tempat dimana gelandangan dan pengemis itu sering berada. Razia ini dilakukan setelah penyuluhan sosial dimulai untuk menjangkaran gelandangan dan pengemis yang selanjutnya ditampung sementara dalam barak penampungan sebelum dikirim ke panti rehabilitasi sosial; (5) Mengoptimalkan fungsi UPTD Liposos dan LSM yang menangani gelandangan dan pengemis; (6) Kerja sama dengan dunia usaha dalam rangka penempatan tenaga kerja gelandangan dan pengemis.

Kata Kunci: Program Penanganan, Gelandangan dan Pengemis

I. PENDAHULUAN

Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945, menegaskan bahwa “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Selanjutnya pasal 34 UUD 1945 menegaskan bahwa “ fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara”. Kenyataannya hingga sekarang kedua amanat tersebut belum bisa diwujudkan dengan baik. Hingga saat ini belum tersedia data yang pasti mengenai jumlah gelandangan dan pengemis di Indonesia. Menurut data dari Kementerian Sosial RI memperkirakan jumlah gelandangan dan pengemis di Indonesia tahun 2015 sekitar 150 ribu dan jumlah ini diperkirakan akan terus bertambah jika pemerintah tidak bersungguh-sungguh menangani dengan baik.

Penelitian tentang penanganan gelandangan dan pengemis ini selalu menarik diteliti. Dari sekian banyak kota di Indonesia, Kota Jember merupakan salah satu kota yang menarik untuk diteliti dengan sejumlah alasan sebagai berikut:

Pertama, Kota Jember merupakan salah satu kota terbesar di Jawa Timur setelah Kota Surabaya dan Kota Malang dengan jumlah gelandangan dan pengemis yang cukup besar dan kini masih terus bermunculan di jalan-jalan pusat kota, terutama di pasar-pasar dan pusat-pusat perbelanjaan. Selama ini Pemerintah Kabupaten Jember melalui Dinas Sosial dan instansi terkait sebenarnya telah berupaya untuk menangani gelandangan dan pengemis dengan berbagai program, namun sejauh ini belum ditemukan model yang lebih tepat sehingga belum ada indikasi permasalahan ini akan segera selesai.

Kedua, Kabupaten Jember juga merupakan salah satu kabupaten dengan tingkat kemiskinan dan kepadatan penduduk yang cukup tinggi. Hal ini tentunya semakin memicu peningkatan jumlah gelandangan dan pengemis. Menurut data dari Dinas Sosial Kabupaten Jember bahwa pada tahun 2015 jumlah gelandangan dan pengemis di Kabupaten Jember sebanyak 801 orang dengan rincian 358 gelandangan dan 443 pengemis (sumber: Dinas Sosial Kabupaten Jember, 2016). Jumlah ini tentunya masih akan terus bertambah jika tidak dilakukan model penanganan yang tepat.

Ketiga, sepanjang pengetahuan penulis penelitian tentang model penanganan gelandangan dan pengemis khususnya di Kabupaten Jember ini belum pernah dilakukan sebelumnya. Padahal peningkatan jumlah gelandangan dan pengemis belakangan ini cenderung terus bertambah sehingga perlu mendapatkan perhatian sangat serius dari seluruh masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Jember, khususnya Dinas Sosial dan instansi terkait

lainnya. Sayangnya, hingga saat ini belum ditemukan model yang tepat dalam menangani terus bermunculannya gelandangan dan pengemis ini.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas permasalahan yang menarik diteliti adalah sebagai berikut:

1. mengapa gelandangan dan pengemis masih terus bermunculan di Kota Jember?
2. bagaimana pelaksanaan program penanganan gelandangan dan pengemis di Kota Jember?

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Gelandangan dan Pengemis

Istilah gelandangan berasal dari kata “gelandang” yang berarti selalu mengembara atau berkelana. Gelandangan dideskripsikan sebagai orang-orang yang tidak mempunyai pekerjaan yang tetap dan layak serta tidak memiliki tempat tinggal tetap dan layak, serta makan minum disebarkan tempat. Sedangkan yang dimaksud pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta dimuka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharap belas kasihan dari orang lain (dalam Anggraini, 2013:1623-1632).

Dari definisi tersebut hanya menitikberatkan pada sebuah perpindahan, sehingga masih terlalu umum untuk menyebut seseorang sebagai gelandangan dan pengemis. Lebih spesifik, Anon (dalam Wijaya, 2014:5656) mengatakan bahwa gelandangan merupakan sekelompok masyarakat yang seringkali ditemukan dalam keadaan tidak lazim di beberapa tempat seperti di bawah jembatan, lorong atau gang sempit maupun disekitar rel kereta api, emperan took amupun ruko, seringkali dalam hidupnya terlihat berbeda dari manusia merdeka atau sejahtera lainnya. Untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, gelandangan berusaha mencari uang dengan berbagai macam cara mulai dari menjadi pemulung, meminta-minta atau pengemis, menjadi tukang semir sepatu, menjadi tukang becak, menjajakan makanan, hingga menjadi pengamen (Ali dalam Wijaya, 2014:5656).

Definisi lebih luas lagi menambahkan pelibatan aspek sosial yang tak terpisahkan dengan kehidupannya seperti yang termuat dalam pasal 1 poin 1 Peraturan Pemerintah nomor 31 tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (peraturan ini merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang nomor 6 tahun 1974 tentang Kesejahteraan Sosial yang sudah diubah menjadi Undang-Undang nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial), bahwa gelandangan merupakan mereka yang hidup dalam keadaan

tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal serta pekerjaan yang tetap pada suatu wilayah tertentu maupun hidup mengembara di tempat umum (dalam Wijaya, 2014:5656).

Berdasarkan Pedoman Rehabilitasi Gelandangan dan Pengemis Tahun 2006, bahwa gelandangan dan pengemis merupakan dua istilah yang sering digunakan untuk menunjuk seseorang yang hidupnya menggelandang, memintaminta tanpa memiliki tempat tinggal secara tetap. Gelandangan atau disebut sebagai *vagrant* dan pengemis disebut sebagai *beggar*, dapat dikatakan bagaikan dua keping mata uang yang tidak terlalu jauh dalam hal perbedaan, karena keduanya secara fungsional bisa terjadi dalam saat secara bersamaan. Gelandangan bisa sekaligus menjadi pengemis demikian pula pengemis bisa menjadi gelandangan. Di banyak negara persoalan gelandangan dan pengemis tumbuh subur seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan kota (dalam Imsiyah, 2016:84).

Dari definisi tersebut dapat dikatakan bahwa kriteria gelandangan (dalam Maulana, 2013:46) adalah sebagai berikut:

- a. Anak sampai dengan usia dewasa, tinggal di sembarang tempat dan hidup mengembara atau menggelandang.
- b. Tidak mempunyai tanda pengenal atau identitas diri.
- c. Tidak mempunyai pekerjaan tetap.

Sedangkan kriteria gelandangan (dalam Maulana, 2013:46) adalah sebagai berikut:

- a. Anak sampai dengan usia dewasa, tinggal di sembarang tempat dan hidup mengembara atau menggelandang.
- b. Tidak mempunyai tanda pengenal atau identitas diri.
- c. Tidak mempunyai pekerjaan tetap.

2.2 Faktor Penyebab Munculnya Gelandangan dan Pengemis

Gelandangan dan pengemis sering kali menjadi suatu kumpulan yang tak terpisahkan, dengan kehidupan jalanan, utamanya jalanan kota besar selalu identik dengan ketiga hal tersebut, yang secara legal adalah perbuatan yang melanggar norma dan hukum, namun disisi lain, konstitusi mengamanahkan kesejahteraan menjadi tanggung jawab negara, ketika terjadi fenomena tersebut maka mengindikasikan tanggung jawab negara dalam hal kesejahteraan sebagai sumber permasalahan masih dipertanyakan, dan banyak lainnya faktor penyebab fenomena munculnya gelandangan, pengemis dan anak jalanan, beberapa sumber baik buku maupun jurnal serta penelitian terdahulu memberikan penjelasan faktor

penyebab yang berbeda-beda, namun memiliki kecenderungan kesamaan (dalam Wijaya, 2014:5656).

Penyebab adanya gelandangan dan pengemis ini dapat disebabkan oleh dua faktor yaitu:

1. faktor internal. Faktor ini berasal dalam keadaan individu yang mendorong mereka untuk menggelandang dan mengemis. Faktor internal ini meliputi: kemiskinan, keluarga, cacat fisik umur, rendahnya keterampilan, rendahnya pendidikan dan sikap mental.
2. Faktor eksternal mencakup lingkungan, letak geografis dan lemahnya penanganan masalah gelandangan dan pengemis. menurut hasil pengamatan sementara, diketahui bahwa faktor internal dan eksternal ini merupakan faktor penyebab mereka menjadi gelandangan dan pengemis (dalam Syani, 2013:46).

Menurut Darwis (dalam Wijaya, 2014:5657) seseorang menjadi gelandangan di ibu kota karena mulanya datang dari desa akibat sudah tidak tahan lagi hidup di desa, dengan penyebab yang bermacam, misalnya karena perlakuan buruk dari keluarga, tanah yang dijual (2005), lebih detailnya darwis membagi menjadi beberapa faktor penyebab munculnya fenomena ini, yaitu:

1. Faktor ekonomi meliputi kurangnya ketersediaan lapangan kerja, kemiskinan dan rendahnya pendapatan perkapita sehingga mengakibatkan tidak tercukupinya kebutuhan hidup;
2. Faktor geografi yang meliputi daerah asal yang minus dan tandus sehingga menjadikan pengolahan tanah atau lahan tidak maksimal;
3. Faktor sosial yang meliputi urbanisasi yang semakin meningkat serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam usaha peningkatan kesejahteraan sosial;
4. Faktor pendidikan yang meliputi relatif rendahnya pendidikan masyarakat mengakibatkan kurangnya bekal serta keterampilan untuk hidup layak;
5. Faktor psikologis yang meliputi adanya keretakan keluarga dan keinginan melupakan kejadian masa lampau yang mengakibatkan menurunnya gairah kerja;
6. Faktor lingkungan yang berkaitan dengan keadaan gelandangan yang telah berkeluarga atau mempunyai anak maka secara tidak langsung terlihat adanya pembibitan gelandangan;
7. Faktor agama yang meliputi rendahnya ajaran agama yang menyebabkan tipisnya iman seringkali membuat mereka mudah putus asa dalam menghadapi cobaan serta seringkali tidak memiliki keinginan untuk berusaha keluar dari suatu cobaan

2.3 Penanganan Gelandangan dan Pengemis

Secara realitas sosial, masyarakat sering memandang bahwa gelandangan dan pengemis sebagai bentuk perilaku sosial yang tidak pantas dan tidak wajar, bahkan secara radikal sudah dinilai sebagai perilaku sosial menyimpang dari budaya normatif. Pelaku gelandangan dan pengemis terkesan kumuh, kumal tanpa mengenal nilai kepantasan dan kewajaran sebagai bagian warga masyarakat yang sehat, sebagaimana masyarakat lainnya beranggapan bahwa gelandangan dan pengemis dinilai mengganggu ketertiban dan keindahan. Oleh karena itu membawa berbagai stigmatisasi bagi para gelandangan dan pengemis menjadi salah satu alasan, bahwa masalah gelandangan dan pengemis dikota-kota besar tidak dapat ditangani secara tuntas (dalam Imsiyah, 2016:84).

Dampak yang dapat ditimbulkan dengan adanya gelandangan dan pengemis ialah keadaan lingkungan yang kotor. Pada umumnya gelandangan tinggal atau tidur di teras-terras toko, bawah jembatan bahkan bawah pohon yang beralaskan kardus atau koran-koran bekas. Ketika mereka berpindah tempat, acapkali meninggalkan alas tempat tidur mereka sehingga meninggalkan sampah yang berujung pada masalah kebersihan. Selain itu adanya gelandangan dan pengemis ini juga menyebabkan rasa ketidaknyamanan masyarakat luas. Contohnya saja ketika mereka beroperasi di jembatan-jembatan penyebrangan ataupun di teras toko yang memungkinkan banyak orang yang melewatinya sehingga cukup mengganggu pengguna jalan tersebut (dalam Syani, 2013:46).

Adanya pengemis juga cukup meresahkan masyarakat, banyak yang menganggap bahwa adanya pengemis dan gelandangan sangat mengganggu masyarakat. Keberadaan mereka bisa saja mengakibatkan masalah kejahatan (kriminal). Dari masalah-masalah inilah yang nantinya keberadaan mereka benar-benar tidak di harapkan oleh masyarakat luas. Sebagai contoh ketika anak-anak kecil yang mengemis di lampu- lampu merah, seringkali mereka memaksa meminta, dan ketika si pengendara mobil tidak memberi, anak-anak ini kemudian menggoreskan suatu benda baik itu paku, maupun benda tajam lainnya sehingga *body* mobil bisa tergores. Hal ini terkadang tidak disadari oleh pengendara mobil, dan mereka mengetahuinya ketika setelah turun dari mobil (dalam Syani, 2013:46).

Beberapa program penanganan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Jember dalam rangka pengentasan gepeng (dalam Maulana, 2013:46-47) adalah sebagai berikut:

- a. Penyuluhan sosial di tempat gepeng berada.

- b. Penguatan keluarga, pemenuhan kebutuhan dasar, layanan kesehatan dan pendidikan, lapangan kerja dan pendapatan keluarga.
- c. Mendirikan pos pelayanan gependeng untuk memberikan konsultasi, pendataan, penjangkaran, rujukan bagi gependeng untuk ditindak lanjuti proses rehabilitasi
- d. Razia dipergunakan setelah penyuluhan sosial dimulai untuk menjangkari gependeng dan ditampung sementara dalam barak penampungan sebelum dikirim ke panti rehabilitasi.
- e. Mengoptimalkan fungsi UPTD Liposos dan LSM yang menangani gependeng.
- f. Kerja sama dengan dunia usaha dalam rangka penempatan tenaga kerja gependeng.

III. METODE PENELITIAN

Bertitik tolak dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, maka jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertitik tolak dari paradigma fenomenologis yang objektivitasnya dibangun atas rumusan tentang situasi tertentu sebagaimana yang dihayati oleh individu atau kelompok sosial tertentu, dan relevan dengan tujuan dari penelitian itu. Tujuan dari penelitian kualitatif adalah lebih berupaya memahami kejadian atas situasi sosial tertentu.

Data-data yang diperoleh dalam penelitian ini diperoleh melalui beberapa sumber data, antara lain:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari sumber asli atau sumber pertama. Sumber pertama disini terdiri dari para informan yang memberikan informasi terkait dengan permasalahan yang diteliti, yaitu: para staf Dinas Sosial Kabupaten Jember;
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber kedua, misalnya: referensi, jurnal, dokumen peraturan perundang-undangan dan arsip-arsip yang berhubungan erat dengan permasalahan yang diteliti.

Dalam rangka untuk memperoleh informasi dari sumber data penelitian ini digunakan metode purposive dengan pertimbangan bahwa informan yang dipilih tersebut dianggap mengetahui permasalahan yang diteliti.

Dalam rangka mengumpulkan data atau informasi dilapangan, maka dalam penelitian digunakan teknik antara lain:

1. Wawancara, yaitu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung kepada para informan. Model wawancara yang digunakan adalah wawancara tertutup dan terbuka.
2. Metode Dokumentasi, yaitu suatu cara untuk mendapatkan data atau informasi berdasarkan catatan atas dokumen yang ada
3. Metode Observasi non partisipan, yaitu cara untuk mendapatkan data atau informasi dengan tidak melibatkan diri secara langsung dalam setiap aktivitas yang dilakukan informan. Dalam proses observasi ini peneliti berusaha mencatat semua aktivitas yang dilakukan para informan.

Setelah semua data atau informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini terkumpul, kemudian disajikan dan dianalisa dengan cara deskriptif kualitatif, artinya data atau informasi yang terkumpul dari para informan digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh suatu kesimpulan penelitian. Analisa data dimulai dari proses reduksi data, interpretasi dan pemeriksaan keabsahan data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Program Kerja Dinas Sosial Kabupaten Jember

Dalam merencanakan program kegiatan, Dinas Sosial Kabupaten Jember mengacu pada lima prinsip pembangunan kesejahteraan sosial, yaitu pencegahan, rehabilitasi, perlindungan, pemberdayaan / pengembangan, dan sarana prasarana / ops kantor. Selanjutnya, sesuai dengan Permendagri Nomor 13 tahun 2006, Program Dinas Sosial 5 (Lima) Tahun kedepan sebagai berikut:

1. Program pengembangan bina swadaya sosial.
2. Program rehabilitasi sosial.
3. Program bantuan perlindungan sosial.
4. Program pengembangan aparatur dan sarana prasarana.

Program-program yang dijalankan oleh Dinas Sosial Kabupaten Jember juga mengacu pada pembagian bidang pelayanan yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Jember yang terdiri dari tiga bidang pelayanan, yaitu:

1. Bidang Pemberdayaan Sosial
2. Bidang Rehabilitasi Sosial
3. Bidang Bantuan dan Perlindungan Sosial

Selanjutnya, beberapa program andalan Dinas Sosial Kabupaten Jember pada adalah sebagai berikut:

1. Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian uang tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan, dimana penerima bantuan dikenai kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan. Setelah mengikuti Program Keluarga Harapan (PKH), diharapkan Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) akan dapat merubah perilaku khususnya dalam bidang kesehatan dan pendidikan. Program Keluarga Harapan (PKH) juga dikenal dengan *Bantuan Tunai Bersyarat (BTB)*.

Latar belakang Program Keluarga Harapan (PKH) dilakukan sejak tahun 2007 sebagai upaya untuk membangun sistem perlindungan sosial bagi Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Pemberian bantuan "bersyarat" kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya di bidang kesehatan dan pendidikan.

Manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) terdiri atas jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek yaitu membantu RTSM dalam mengurangi beban pengeluaran sehari-hari. Bantuan diberikan per 3 bulan kepada ibu atau wanita dewasa dalam RTSM dan tidak ada syarat untuk penggunaan uang. Sedangkan jangka panjang yaitu memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui meningkatkan kualitas kesehatan atau nutrisi, pendidikan dan kapasitas pendapatan di masa depan (*price effect*) anak Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM), memberikan kepastian kepada si anak akan masa depannya (*insurance effect*).

2. Pemantapan TAGANA

Pemantapan TAGANA adalah program kegiatan dalam rangka memantapkan lembaga dan personil anggota TAGANA, untuk selalu siap, tanggap darurat, dan trampil dalam penanggulangan bencana dan pengungsi di Kabupaten Jember. Hal ini dilakukan sebagai upaya antisipasi apabila di Kabupaten Jember sewaktu-waktu terjadi Bencana Alam. Kabupaten Jember merupakan salah satu wilayah di Jawa Timur yang termasuk dalam kategori Rawan Bencana, antara lain yang pernah terjadi :

- a. Bencana Banjir Bandang / Banjir ;
- b. Bencana Tanah Longsor;
- c. Bencana Angin Puting Beliung;

3. Pemberdayaan ORSOS

Dilaksanakan dalam rangka diagnosis dan pemberian motivasi, penguatan kelembagaan masyarakat, kemitraan dan penggalangan dana, serta pemberian

stimulan bagi Yayasan Panti Asuhan baik lembaga maupun anak-anak yatim / yatim piatu /terlantar, merupakan anak-anak terlantar yang telah mendapatkan perlindungan dari lembaga YPA.

Program Kegiatan yang telah dilakukan antara lain :

- a. Pemberian bantuan permakanan (Pusat).
- b. Jaminan Askesos (Pusat).
- c. Bantuan-bantuan lain dalam rangka untuk meringankan beban lembaga maupun anak-anak yatim di dalam panti.

4. Program Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Tujuan PMKS adalah meningkatkan kemampuan dan pemberdayaan PMKS dengan memberikan peluang hidup yang produktif sehingga diharapkan dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan memenuhi kebutuhan hidupnya secara memadai dan wajar. Upaya pengentasan gelandangan dan pengemis dapat dilakukan dengan cara:

- a. Penyuluhan sosial di lokasi tempat gepeng dan anjal berada
- b. Penguatan keluarga, pemenuhan kebutuhan dasar, layanan kesehatan dan pendidikan, lapangan kerja dan pendapatan keluarga
- c. Mendirikan pos pelayanan gelandangan dan pengemis untuk memberikan konsultasi, pendataan, penjangkaran, rujukan bagi gelandangan dan pengemis untuk ditindak lanjuti proses rehabilitasi
- d. Razia dipergunakan setelah penyuluhan sosial dimulai untuk menjangkari gelandangan dan pengemis untuk ditampung sementara dalam barak penampungan sebelum dikirim ke panti
- e. Rehabilitasi mengoptimalkan fungsi UPT Liposos dan LSM yang menangani gelandangan dan pengemis
- f. Kerja sama dengan dunia usaha dalam rangka penempatan tenaga kerja gelandangan dan pengemis

4.2. Program Penanganan Gelandangan dan Pengemis

Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat serta tidak mempunyai mata pencaharian dan tempat tinggal yang tetap. Kriterianya adalah:

- a. Anak sampai dengan usia dewasa, tinggal di sembarang tempat dan hidup mengembara atau menggelandang.
- b. Tidak mempunyai tanda pengenal atau identitas diri.
- c. Tidak mempunyai pekerjaan tetap.

Selanjutnya pengemis adalah orang yang mendapatkan penghasilan dengan cara meminta-minta ditempat umum dengan berbagai cara, dengan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain. Kriterianya adalah:

- a. Anak sampai dengan usia dewasa.
- b. Meminta-minta ditempat umum.
- c. Bertingkah laku untuk mendapatkan belas kasihan.
- d. Biasanya mempunyai tempat tinggal tertentu atau menetap, membaur dengan penduduk pada umumnya.

Sesungguhnya, seorang pengemis merupakan mereka yang memiliki pekerjaan meminta-minta kepada orang lain di tempat-tempat umum untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain. Pada dasarnya, setiap orang berpikiran bahwa seorang pengemis adalah golongan masyarakat yang kurang mampu, sehingga mengharuskan mereka meminta-minta ke orang lain. Namun pemikiran tersebut tidak sepenuhnya benar, hal tersebut dikarenakan di beberapa wilayah di Indonesia dapat ditemui adanya kampung pengemis. Kampung pengemis bukanlah sebuah wilayah kumuh dengan lingkungan yang kotor, namun di daerah tersebut berdiri bangunan-bangunan layak huni yang ternyata bangunan tersebut merupakan rumah (tempat tinggal) para pengemis. Bahkan hal yang lebih mencengangkan lagi adalah besarnya penghasilan yang diperoleh pengemis selama satu bulan bisa saja melebihi penghasilan pegawai di instansi pemerintahan.

Pada dasarnya gelandangan dan pengemis adalah dua hal yang berbeda. Pengemis merupakan suatu kondisi dimana seseorang mencari penghasilan dengan cara meminta-minta dan memiliki tempat tinggal yang tetap, bahkan pengemis dijadikan sebagai suatu profesi pekerjaan tetap mereka. Sedangkan, gelandangan merupakan seseorang yang tidak memiliki mata pencaharian dan tempat tinggal yang tetap. Namun, dalam penanganannya, program yang dijalankan oleh Dinas Sosial biasanya langsung mencakup kedua unsur tersebut yaitu gelandangan dan pengemis (gepeng).

Permasalahan yang dialami oleh gepeng pada umumnya adalah memiliki masalah hidup yang cukup kompleks; berpikir pragmatis (mendapatkan kehidupan yang lebih baik dengan cara yang cepat); cenderung menyembunyikan identitas; tercabut dari akar keluarga dan budaya; minimnya pendidikan dan ketrampilan; dan gagal dalam banyak hal (sehingga menggelandang menjadi sebuah alternatif pilihan).

Berdasarkan studi dokumentasi yang dilakukan ada beberapa program yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Jember dalam rangka penanganan gelandangan dan pengemis, diantaranya:

- a. Penyuluhan sosial di tempat gelandangan dan pengemis berada;
- b. Penguatan keluarga, pemenuhan kebutuhan dasar, layanan kesehatan dan pendidikan, lapangan kerja dan pendapatan keluarga;
- c. Mendirikan pos pelayanan gelandangan dan pengemis untuk memberikan konsultasi, pendataan, penjangkaran, rujukan bagi gelandangan dan pengemis untuk ditindak lanjuti proses rehabilitasi;
- d. Melakukan Razia di tempat-tempat dimana gelandangan dan pengemis itu sering berada. Razia ini dilakukan setelah penyuluhan sosial dimulai untuk menjangkari gelandangan dan pengemis yang selanjutnya ditampung sementara dalam barak penampungan sebelum dikirim ke panti rehabilitasi social;
- e. Mengoptimalkan fungsi UPTD Liposos dan LSM yang menangani gelandangan dan pengemis;
- f. Kerja sama dengan dunia usaha dalam rangka penempatan tenaga kerja gelandangan dan pengemis.

Program penanganan gepeng tersebut dilakukan di tempat rehabilitasi yaitu di UPTD LIPOSOS (Lingkungan Pondok Sosial) yang berlokasi di Jalan Tawes No.306 Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember. UPTD LIPOSOS merupakan tempat rehabilitasi para PMKS termasuk gelandangan dan pengemis. UPTD LIPOSOS sendiri merupakan penampungan PMKS dari semua kabupaten yang ada di Jawa Timur wilayah timur, dalam proses pembinaan dilakukan selama 6 bulan dan sudah disediakan asrama untuk tempat tinggal selama dalam masa pembinaan. Dalam penanganan gelandangan dan pengemis hal-hal yang perlu dipikirkan ke depan :

1. Kerja sama antar daerah, sektoral, dunia usaha;
2. Peningkatan kualitas SDM disertai peningkatan sarana dan prasarana kesejahteraan;
3. Menempatkan SDM yang sesuai dengan keahlian baik yang ada di instansi pemerintahan maupun organisasi sosial.

Oleh karena itu Dinas Sosial selaku pelaksana penyelenggaraan kesejahteraan sosial terus berusaha semaksimal mungkin agar penanganan gelandangan dan pengemis di Kabupaten Jember ini dapat terlaksana sesuai dengan program yang ada secara baik dan benar serta bisa menjadi pelayan dan harapan masyarakat yang dapat dipertanggung jawabkan. Dinas Sosial Kabupaten Jember ingin merubah mind set kepada masyarakat bahwa menangani gelandangan dan pengemis adalah bukan semata-mata pekerjaan amal tetapi pekerjaan profesional yang harus dilakukan oleh yang profesional juga di

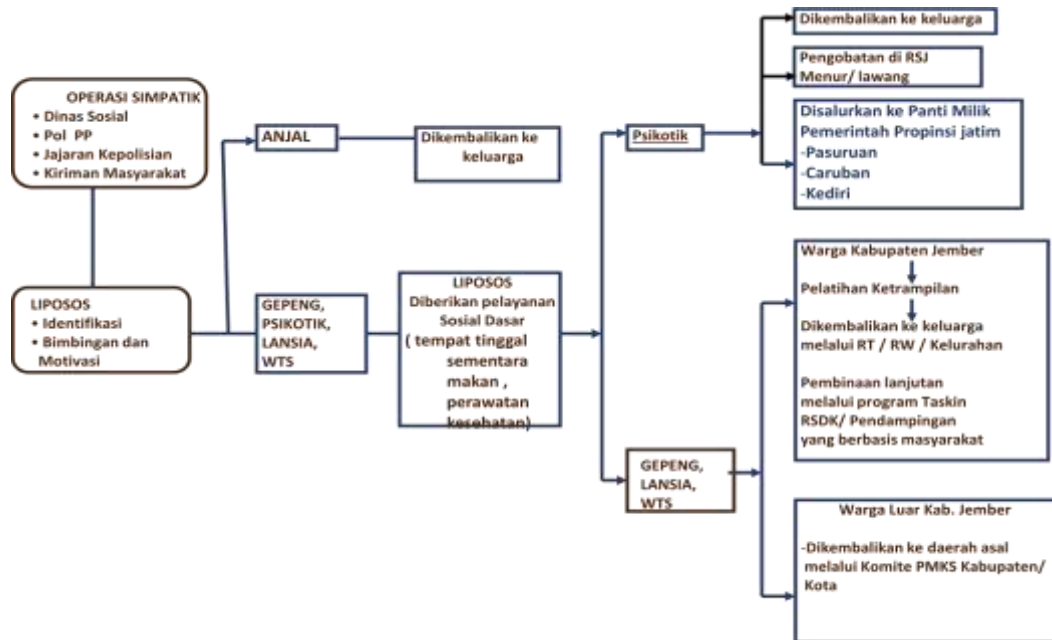
bidangnya. Supaya proses pelayanan dalam menangani masalah sosial khususnya gelandangan dan pengemis dapat dilakukan secara benar dan prosedural.

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan salah satu staf Dinas Sosial Kabupaten Jember mengaku kesulitan dalam menangani gepeng tersebut terlebih dalam pendataan. Tidak banyak gelandangan dan pengemis yang mau di data dan pendataannya sangat sulit sebab kebanyakan diantara mereka banyak yang berpindah-pindah tempat untuk menggepeng. Gelandangan dan pengemis khususnya pengemis kebanyakan musiman dan hal ini banyak terjadi pada bulan ramadhan, banyak pengemis yang berkeliaran untuk meminta-minta, sehingga data gelandangan dan pengemis yang ada di dinas terkait tidak valid. Setiap kali Dinas Sosial melakukan pendataan terhadap gepeng tersebut sulit sekali ditemukan, karena setiap dilakukan pendataan mereka selalu menghindari, tidak mau didata kadang juga mereka mangkalnya di tempat yang berbeda-beda, ada yang mangkal di pasar, emperan toko, keliling di rumah penduduk dan masih banyak lagi tempat yang dijadikan sebagai tempat mangkal mereka. Banyak juga yang dari luar Kabupaten Jember yang datang minta-minta ke Daerah Jember dan ini menjadi tugas Dinas Sosial yang menangani masalah ini untuk menertibkannya.

Menghadapi persoalan gepeng yang terdapat di Kabupaten Jember sudah berulang kali dilakukan razia dan penertiban dengan melibatkan polisi pamong praja (pol-pp), namun sampai saat ini belum bisa dituntaskan. Setiap mereka tertangkap oleh pol-pp mereka dibawa ke kantor Dinas Sosial untuk dimintai keterangan mengapa mengemis dan masih mangkal disana, setelah mereka diberikan pengertian mereka diberikan pesangon untuk membuka usaha kecil-kecilan, akan tetapi mereka tetap masih beraktivitas seperti semula dan mereka menolak untuk diberikan pembinaan. Banyak sekali usaha yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk menangani masalah gepeng mulai dari pendataan yang mengalami kesulitan dari para gepeng yang enggan mau didata kemudian razia yang bertujuan untuk menertibkan para gepeng pun tidak berhasil sepenuhnya karena pada dasarnya para gepeng tidak mau dibina oleh pemerintah, ada sebagian dari gepeng yang mau dibina oleh pemerintah yang kini berada dalam asuhan pemerintah.

Berikut ini merupakan Prosedur Penanganan gelandangan dan pengemis di Kabupaten Jember:

Oleh: Baktiawan Nusanto, Debby Cahya Nuriantika, Putri Robiatul Adawiyah
 PROGRAM PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KABUPATEN JEMBER



Bagan 4.1. Prosedur Penanganan PMKS di Kabupaten Jember

Berdasarkan bagan diatas, maka dapat dilihat bahwa prosedur awal penanganan gelandangan dan pengemis di Kabupaten Jember adalah dengan dilakukannya operasi simpatik oleh Dinas Sosial, Polisi Pamong Praja, jajaran Kepolisian, dan Kiriman Masyarakat. Setelah dilakukannya operasi simpatik, maka gelandangan dan pengemis dibawa ke Lingkungan Pondok Sosial ((LIPOSOS) guna dilakukan identifikasi, bimbingan dan motivasi. Kemudian, sesuai dengan golongannya, anak jalanan akan langsung dikembalikan kepada keluarganya. Sedangkan untuk gelandangan, pengemis, lanjut usia, dan wanita tuna susila akan diberikan pelayanan sosial dasar di Lingkungan Pondok Sosial (LIPOSOS) berupa tempat tinggal sementara, makan, dan perawatan kesehatan. Tindak lanjut yang diambil selanjutnya adalah sebagai berikut:

- Tindak lanjut bagi Gelandangan psikotik dapat dilakukan beberapa cara yaitu dikembalikan ke keluarga; pengobatan di rumah sakit jiwa; atau disalurkan ke panti milik pemerintah.
- Tindak lanjut bagi gelandangan dan pengemis yang sudah lanjut usia, serta wanita tuna susila dilakukan dengan beberapa cara yaitu untuk warga Kabupaten Jember diberikan pelatihan keterampilan terlebih dulu sebelum dikembalikan ke keluarga dan untuk untuk warga di luar Kabupaten Jember langsung dikembalikan ke daerah asal melalui Komite PMKS Kabupaten/Kota.

Secara kuantitatif, data gelandangan dan pengemis mulai tahun 2013 sampai 2015 dapat dijelaskan sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 4.1

Perkembangan Jumlah Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Jember

No	Jenis PMKS			
		2013	2014	2015
1	Pengemis	155	421	443
2	Gelandangan	43	354	358
		198	775	801

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Jember, 2016

Data tabel 4.1. menunjukkan bahwa permasalahan khusus sesuai sasaran pokok pembangunan kesejahteraan sosial yaitu masalah PMKS (Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial) menunjukkan “ trend meningkat” dari tahun 2013 ke tahun 2015. Hal ini berarti belum ada progres yang signifikan terhadap penanganan masalah tersebut. Sebagai contoh jumlah gelandangan pada tahun 2013 berjumlah 43 dan pada tahun 2015 menjadi 358. Demikian pula terjadi peningkatan jumlah pengemis pada tahun 2013 berjumlah 155 dan pada tahun 2015 berjumlah 443. Hal ini berarti belum terjadi progres pemberdayaan yang cukup signifikan pada infrastruktur kesejahteraan sosial.

Penanggulangan gelandangan dan pengemis yang meliputi usaha-usaha preventif, represif dan rehabilitatif bertujuan agar tidak terjadi pergelandangan dan pengemisan, serta mencegah meluasnya pengaruh akibat pergelandangan dan pengemisan di dalam masyarakat, dan memasyarakatkan kembali gelandangan dan pengemis menjadi anggota masyarakat yang menghayati harga diri, serta memungkinkan pengembangan para gelandangan dan pengemis untuk memiliki kembali kemampuan guna mencapai taraf hidup, kehidupan, dan penghidupan yang layak sesuai dengan harkat martabat manusia.

Usaha preventif dimaksudkan untuk mencegah timbulnya gelandangan dan pengemis di dalam masyarakat, yang ditujukan baik kepada perorangan maupun kelompok masyarakat yang diperkirakan menjadi sumber timbulnya gelandangan dan pengemis. Usaha preventif sebagaimana dimaksud antara lain dengan :

1. penyuluhan dan bimbingan sosial;
2. pembinaan sosial;
3. bantuan sosial;
4. perluasan kesempatan kerja;
5. pemukiman lokal;
6. peningkatan derajat kesehatan.

Selanjutnya usaha represif dimaksudkan untuk mengurangi dan / atau meniadakan gelandangan dan pengemis yang ditujukan baik kepada seseorang

maupun kelompok orang yang disangka melakukan pergelandangan dan pengemis. Usaha represif sebagaimana dimaksud meliputi :

1. Razia,
 - a. Razia dapat dilakukan sewaktu-waktu baik oleh pejabat yang berwenang untuk itu maupun oleh pejabat yang atas perintah Menteri diberi wewenang untuk itu secara terbatas
 - b. Razia yang dilakukan oleh pejabat yang diberi wewenang kepolisian terbatas dilaksanakan bersama-sama dengan kepolisian
 - c. Penampungan sementara untuk diseleksi,
 - d. Gelandangan dan pengemis yang terkena razia ditampung dalam penampungan sementara untuk diseleksi. Seleksi dimaksudkan untuk menetapkan kualifikasi para gelandangan dan pengemis dan sebagai dasar untuk menetapkan tindakan selanjutnya yakni pelimpahan.
2. Pelimpahan.

Pelimpahan ini merupakan tindak lanjut dari usaha sebelumnya yang telah terseleksi. Adapun cara pelimpahan ini sebagai berikut :

- a. Dilepas dengan syarat;
- b. Dimasukkan dalam Panti Sosial;
- c. Dikembalikan kepada orang tua / wali / keluarga / kampung halamannya;
- d. Diserahkan kepada Pengadilan;
- e. Diberikan pelayanan kesehatan.

Usaha tindak lanjut ditujukan kepada gelandangan dan pengemis yang telah disalurkan, agar mereka tidak kembali menjadi gelandangan dan pengemis dengan meningkatkan kesadaran berswadaya, memelihara, memantapkan dan meningkatkan kemampuan sosial ekonomi, dan menumbuhkan kesadaran hidup bermasyarakat.

Lebih lanjut usaha rehabilitatif terhadap gelandangan dan pengemis meliputi usaha-usaha penampungan, seleksi, penyantunan, penyaluran dan tindak lanjut, bertujuan agar fungsi sosial mereka dapat berperan kembali sebagai warga masyarakat. Usaha rehabilitatif sebagaimana dilaksanakan melalui Panti Sosial.

1. Usaha penampungan ditujukan untuk meneliti / menseleksi gelandangan dan pengemis yang dimasukkan dalam Panti Sosial untuk menentukan kualifikasi pelayanan sosial yang akan diberikan, ditujukan untuk mengubah sikap mental gelandangan dan pengemis dari keadaan dari keadaan nonproduktif menjadi keadaan produktif melalui bimbingan, pendidikan dan latihan fisik, mental maupun sosial serta keterampilan kerja sesuai dengan bakat dan kemampuannya.

2. Usaha penyantunan dimaksudkan supaya para gelandangan dan pengemis tidak lagi turun jalan untuk melakukan pergelandangan dan pengemisian karena sudah dapat bantuan modal usaha kerja dan lain-lain dari pemerintah.
3. Usaha penyaluran ditujukan kepada para gelandangan dan pengemis yang telah mendapat bimbingan, pendidikan, pelatihan dan keterampilan kerja dalam rangka pendayagunaan mereka terutama di sektor produksi dan jasa, melalui jalur-jalur transmigrasi swakarya dan pemukiman lokal.
4. Usaha tindak lanjut ditujukan kepada gelandangan dan pengemis yang telah disalurkan, agar mereka tidak kembali menjadi gelandangan dan pengemis yang dilakukan dengan cara :
 - a. Meningkatkan kesadaran berswadaya;
 - b. Memelihara, memantapkan dan meningkatkan kemampuan sosial ekonomi;
 - c. Menumbuhkan kesadaran hidup bermasyarakat secara normal.

Sebagai salah satu potret kemiskinan di Kabupaten Jember adalah masih banyak ditemukannya gelandangan dan pengemis (gepeng), anak jalanan dan anak terlantar yang tidak bisa menikmati sekolah dan masih banyak terlihat di emperan toko, perkantoran, alun-alun, pasar dan juga rumah-rumah penduduk di sekitar Kabupaten Jember.

Kehadiran mereka sering kali dianggap sebagai cerminan kemiskinan yang ada di Kabupaten Jember atau suatu kegagalan yang beradaptasi di sekelompok orang terhadap kehidupan dinamis kota, terutama di bulan suci ramadhan biasanya gepeng dan anjal meningkat drastis seperti bulan puasa kemarin, masih banyak ditemukan dan tidak hanya di Kabupaten Jember saja.

Hal ini menjadi tugas pemerintah daerah khususnya Dinas Sosial Kabupaten Jember dalam menangani masalah-masalah kesejahteraan sosial seperti gelandangan, pengemis, anak jalanan dan masih banyak masalah-masalah sosial lainnya. Dinas Sosial tidak hanya berpangku tangan dengan semua ini diantaranya pemerintah telah mengagendakan beberapa program untuk menangani PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) yang termasuk di dalamnya adalah gepeng itu sendiri.

4.3 Kendala Yang Dihadapi

Dari studi dokumentasi yang dilakukan ditemukan beberapa kendala yang dihadapi dalam penanganan masalah gelandangan dan pengemis sebagai berikut:

1. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (Personil) pada Dinas Sosial Kabupaten Jember, utamanya tenaga Pekerja Sosial Kecamatan (PSK), dimana sebelum terbentuknya Dinas Sosial, petugas tersebut merupakan bagian dari personil

Dinas Sosial yang berada di kecamatan-kecamatan, sehingga memperlancar tugas-tugas usaha kesejahteraan sosial.

2. Kurang mencukupinya / memadainya sarana prasarana (Mobilitas) dinas dibanding tugas-tugas kesejahteraan sosial yang begitu kompleks, utamanya di dalam pelaksanaan penanganan Jember Bebas Gepeng dan penanganan korban bencana alam maupun bencana sosial, seperti kebakaran, banjir, dan lain-lain.
3. Dasar-dasar keterampilan penanganan usaha kesejahteraan sosial di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Jember masih kurang sehingga perlu ditingkatkan.
4. Koordinasi antar Lembaga terkait (stakeholders) dalam penanganan usaha-usaha kesejahteraan sosial masih lemah sehingga perlu terus ditingkatkan / dioptimalkan.
5. Profesional aparat baik dari Dinas Sosial maupun pelaku-pelaku kesejahteraan sosial, seperti Karang Taruna, PSM, Orsos, Tagana dan lain sebagainya juga masih kurang sehingga perlu ditingkatkan.
6. Ketersediaan dana / anggaran yang dialokasikan pada Dinas Sosial relatif kecil, sehingga belum dapat memenuhi tuntutan kebutuhan untuk penanggulangan masalah usaha kesejahteraan sosial di Kabupaten Jember.

Dalam melakukan pembinaan terhadap gelandangan dan pengemis, pemerintah daerah Kabupaten Jember melalui Dinas Sosial terus berupaya secara maksimal, hanya saja Dinas Sosial juga masih menemukan banyak kendala dari gelandangan dan pengemis yang bersangkutan, seperti tidak mau didata, tidak mau diberikan pelatihan keterampilan, padahal pemerintah telah memberikan dana bantuan, akan tetapi mereka susah meninggalkan kebiasaan mereka itu. Disinilah letak karakter dan mental para gelandangan dan pengemis yang hanya ingin bertindak sendiri tanpa mau mengikuti aturan pemerintah yang ada. Oleh karena itu Dinas Sosial akan menindak tegas para gelandangan dan pengemis ini yang tidak mau dibina agar mereka tidak lagi kembali di jalan.

V. PENUTUP

Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa selama tiga terakhir (2013 – 2015) jumlah gelandangan dan pengemis di Kabupaten Jember cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Selain disebabkan oleh belum maksimalnya Dinas Sosial dalam melaksanakan program penanganan gelandangan dan pengemis, peningkatan jumlah gelandangan dan pengemis ini juga disebabkan oleh semakin meningkatnya jumlah angka kemiskinan di Kabupaten Jember. Sampai dengan tahun 2015 jumlah gelandangan dan pengemis di Kabupaten Jember mencapai 801 orang.

Dalam upaya menangani masalah gelandangan dan pengemis ini Dinas Sosial Kabupaten Jember telah melaksanakan berbagai program diantaranya:

- a. Penyuluhan sosial di tempat gelandangan dan pengemis berada;
- b. Penguatan keluarga, pemenuhan kebutuhan dasar, layanan kesehatan dan pendidikan, lapangan kerja dan pendapatan keluarga;
- c. Mendirikan pos pelayanan gelandangan dan pengemis untuk memberikan konsultasi, pendataan, penjangkaran, rujukan bagi gelandangan dan pengemis untuk ditindak lanjuti proses rehabilitasi;
- d. Melakukan Razia di tempat-tempat dimana gelandangan dan pengemis itu sering berada. Razia ini dilakukan setelah penyuluhan sosial dimulai untuk menjangkari gelandangan dan pengemis yang selanjutnya ditampung sementara dalam barak penampungan sebelum dikirim ke panti rehabilitasi social;
- e. Mengoptimalkan fungsi UPTD Liposos dan LSM yang menangani gelandangan dan pengemis;
- f. Kerja sama dengan dunia usaha dalam rangka penempatan tenaga kerja gelandangan dan pengemis.

Dari masalah yang ditemukan, maka dalam penelitian ini dapat diberikan saran-saran sebagai berikut:

- a. Dinas Sosial Kabupaten Jember perlu lebih intens melakukan sosialisasi dan penyuluhan sosial di tempat gelandangan dan pengemis berada;
- b. Perlu lebih diperkuat dan dikembangkan lagi pemenuhan kebutuhan dasar, layanan kesehatan dan pendidikan, lapangan kerja dan pendapatan bagi keluarga miskin;
- c. Perlu lebih dioptimalkan fungsi pos pelayanan gelandangan dan pengemis untuk memberikan konsultasi, pendataan, penjangkaran, rujukan bagi gelandangan dan pengemis untuk ditindak lanjuti proses rehabilitasi;
- d. Perlu dilakukan Razia secara kontinu di tempat-tempat dimana gelandangan dan pengemis itu sering berada.;

- e. Perlu lebih dioptimalkan fungsi UPTD Liposos dan LSM yang menangani gelandangan dan pengemis;
- f. Perlu lebih meningkatkan kerja sama dengan dunia usaha dalam rangka penempatan tenaga kerja gelandangan dan pengemis.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, Kusuma, Yulianti, Lisa. 2013. *Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) Kota Samarinda Nomor 16 Tahun 2002 Tentang Penertiban dan Penanggulangan Gelandangan Pengemis Di Kota Samarinda*. eJournal Ilmu Administrasi Negara, 2013, 1 (4): 1623-1632 ISSN 0000-0000, ejournal.an.fisip-unmul.ac.id © Copyright 2013
- Astini, Nuha, Fatin, 2014. *Empirical Study Praktek Inovasi Birokrasi Dalam Penanganan Permasalahan Gelandangan Di Kota Surabaya*, Jurnal Administrative Vol. 2 No. 2 Juli 2014
- Imsiyah, Niswatul, 2016. *Peranan Pendidikan Nonformal Sebagai Upaya Rehabilitasi Gelandangan dan Pengemis*. Jurnal Pancaran Volume V No.1. Februari 2016
- Maulana, Akbar, 2013. *Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Masalah Gelandangan Dan Pengemis Di Kabupaten Jember*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jember, Jember
- Wijaya, Fefta, Andi, dkk. 2014, *Empirical Study Praktek Inovasi Birokrasi Dalam Penanganan Permasalahan Gelandangan Di Kota Surabaya*. Jurnal Administrare, Vol. 2 No. 2, Juli – Desember 2014
- Syani, Abdul, dkk. 2013. *Penyebab Terjadinya Gelandangan dan Pengemis*, Jurnal Sociologie, Vol. 1, No. 1: 43-52, Universitas Lampung